

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KEGIATAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI *UNIT LINK* MELALUI AGEN

Asuransi *unit link* mengkombinasikan dua produk keuangan, yaitu produk asuransi dan produk investasi. Sebagai agen dari perusahaan asuransi, agen asuransi bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi, sehingga agen asuransi berkewajiban untuk menerapkan prinsip itikad baik dalam pemasaran produk asuransi *unit link*. Dalam prakteknya, agen tidak menjelaskan secara detil mengenai isi polis produk asuransi *unit link* tersebut. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik perjanjian asuransi *unit link* terkait dengan perbuatan agen dalam memasarkan produk *unit link* perusahaan asuransi. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggungjawab perusahaan asuransi terhadap perbuatan agen dalam memasarkan produk asuransi *unit link*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan analisis hasil yang didapatkan adalah perjanjian asuransi *unit link* juga termasuk dalam perjanjian asuransi secara umum. Yaitu terkait tentang adanya unsur pasal 1320 BW yang dibagi menjadi 2 (dua) unsur subyektif dan obyektif. Bilamana pada akhirnya tetap menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh konsumen terkait dengan pemasaran produk *unit link* melalui agen perusahaan asuransi, maka penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan perusahaan asuransi dapat dilakukan mediasi melalui lembaga mediasi sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

KATA KUNCI: Perusahaan Asuransi Jiwa, Agen, Produk Asuransi *Unit Link*, Konsumen

ABSTRACT

LIABILITIES OF INSURANCE COMPANY FOR THE ACTS OF AGENTS TO OFFER UNIT LINK INSURANCE PRODUCTS

Unit link insurance combines two financial products, namely insurance products and investment products. As an agent of an insurance company, the insurance agent acts for and on behalf of the insurance company in marketing insurance products, so the insurance agent is obliged to apply the principle of good faith in the marketing of unit-linked insurance products. In practice, the agent does not explain in detail about the contents of the unit link insurance product policy. To find out and analyze the characteristics of the unit link insurance agreement related to the agent's actions in marketing the insurance company's unit link products. The purpose of this thesis is to analyze the forms of responsibility of insurance companies towards the actions of agents in marketing unit-linked insurance products. This research uses normative legal research with a statutory approach. So based on the analysis of the results obtained is a unit link insurance agreement also included in the general insurance agreement. Namely related to the existence of elements of article 1320 BW which is divided into 2 (two) subjective and objective elements. If in the end it still causes a loss suffered by consumers related to marketing unit link products through insurance company agents, then the dispute resolution between the insured and the insurance company can be mediated through the mediation institution in accordance with the rules stipulated in article 54 of Law Number 40 2014 concerning Insurance.

KEYWORD: Insurance Company, Agents, Unit Link Insurance Product, Customer.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Disini penulis mengambil judul “**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KEGIATAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK MELALUI AGEN**”. Penulisan ini ditulis untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan penulisan Tugas Akhir dalam mencapai Magister Kenotariatan

Tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Zahry Vandawati, S.H., MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya serta memberikan nasihat, bimbingan, arahan serta bantuan demi kesempurnaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH., Bapak Ghansam Anand, S.H., M.Kn, Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.Kn selaku dewan penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah dengan sepenuh hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
7. Seluruh teman-teman yang kusayang Kelas Malam Magister Kenotaritan UNAIR 2018 Genap, yang selalu saling memotivasi satu sama lain dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Surabaya, Januari 2020

Penulis,

SELVI WIBRIANA SARI

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/ *Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) ((Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/Pojk.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2475/LK/2004 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Bursa Efek di Negara Lain

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2019 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

Keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 03/AAJI/RAT/2012 tentang SK Standar Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

.